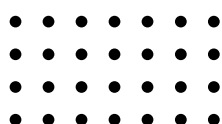




Laporan Keuangan (UAKPA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan III 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Jakarta, 20 Oktober 2025

Pt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.,M.M
NIP. 197803272002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	1
RINGKASAN LAPORAN	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	4
NERACA	5
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
A. PENJELASAN UMUM	9
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	9
B.2 Capaian Output.....	18
B. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA.....	20

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas tanpa Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 September 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Jakarta, 20 Oktober 2025

Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Triwulan III Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1,380,000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,380,000 atau mencapai 79.31 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1,740,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp10,070,000 atau mencapai 1.95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp517,200,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 September 2025 . Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3,075,000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3,075,000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3,535,000 dan Rp-460,000.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1,380,000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10,530,000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-9,150,000, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9,150,000.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024**

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	1,740,000	1,380,000	79.31	1,110,000
JUMLAH PENDAPATAN		1,740,000	1,380,000	79.31	1,110,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	517,200,000	10,070,000	1.95	94,767,000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		517,200,000	10,070,000	1.95	94,767,000



Jakarta, 20 Oktober 2025
Pt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024**

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	1,740,000	1,380,000	79.31	1,110,000
JUMLAH PENDAPATAN		1,740,000	1,380,000	79.31	1,110,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	517,200,000	10,070,000	1.95	94,767,000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		517,200,000	10,070,000	1.95	94,767,000



Jakarta, 20 Oktober 2025
Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1,275,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1,800,000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		3,075,000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-

Aset Konsesi Jasa	C.35		
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36		
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3,075,000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	1,800,000	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	460,000	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	1,275,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3,535,000	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		3,535,000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	(460,000)	-
JUMLAH EKUTAS		(460,000)	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,075,000	-



Jakarta, 20 Oktober 2025
Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024**

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	1,380,000	1,110,000
Jumlah Pendapatan		1,380,000	1,110,000
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.5	7,730,000	14,317,000
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	2,800,000	80,450,000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		10,530,000	94,767,000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(9,150,000)	(93,657,000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(9,150,000)	(93,657,000)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(9,150,000)	(93,657,000)



Jakarta, 20 Oktober 2025
Pr. Sekretaris,

Yahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2025 DAN 30 SEPTEMBER 2024**

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(9,150,000)	(93,657,000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	8,690,000	93,657,000
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(460,000)	-
EKUITAS AKHIR	E.6	(460,000)	-



Jakarta, 20 Oktober 2025
Pl. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M
NIP. 197803272002122001

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Koninkrijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153.

Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua Staatsblad di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah. Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938M bertepatan tanggal 5 Muharam 1357H berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946.

Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama RI. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 20 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke

Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantikannya, Drs. H. M. Taufik sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat.

Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada era ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki tugas untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di wilayah DKI Jakarta, yaitu membantu para pencari keadilan dalam lingkup peradilan agama, khususnya agama Islam. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”. Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
4. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 30 September 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan PeJulirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan IIITahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Beban (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.
- b. Aset tetap
 - Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/Km.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 30 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tabel 1. Penggolongan Masa manfaat Aset tak berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.2 Capaian Output

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	66,850,000	470.000		7	7	Kegiatan	-	Terkena efisiensi
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Pengelolaan PNBPNBP	89,350,000	-		1	-	Kegiatan	-	Belum ada kegiatan yang terlaksana
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	361,000,000	9.600.000	11,2	1	-	Kegiatan	32,8	Sudah ada realisasi
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-1)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Efisiensi Anggaran				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-2)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Perbaikan Revisi Efisiensi dari Badilag				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-3)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Buka Blokir Efisiensi Anggaran, kecuali pagu perjadi				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-4)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-5)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Buka Blokir PNBPNBP dan Pergeseran Anggaran				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2525 (revisi ke-6)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	517.200.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		

Penjelasan Capaian Output :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat Anggaran pada RO ini telah diefisiensi pusat karena sebagian besar merupakan perjadi namun pagu di sakti belum berubah, sehingga target output telah disempurnakan di menu caput sakti;
2. Kegiatan Bimtek pengelolaan PNBPNBP direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Oktober 2025;

3. Terdapat penambahan anggaran pada kegiatan Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dan direncanakan realisasinya pada Triwulan IV Tahun 2025.

B. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 September 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi Kementerian/Lembaga:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 30- Sep	Sisa Pagu s.d. 30-Sep- 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
52	433.865.000	10.070.000	389.795.000	389.795.000	433.865.000	-
Total	433.865.000	10.070.000	389.795.000	389.795.000	433.865.000	-

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang sebesar Rp10.070.000 atau 2,32% dari pagu tahun 2025. Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan (< 70%) disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan.

Kegiatan yang rencananya didanai dari sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 389.795.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat sebesar Rp1.760.000;
2. Program Koordinasi Pengelolaan PNBPN sebesar Rp.55,350,000;
3. Program Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama sebesar Rp.332,685,000.

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp.433.865.000 dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp83.335.000.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta rencana mitigasi Kementerian/Lembaga:

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 30- Sep- 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	-	-
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	-	-	-	-	-

5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

Tidak terdapat akun belanja Pegawai pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan kode 401113 sehingga tidak ada rincian belanja minus Belanja Pegawai.

c. Informasi Pagu Blokir Kementrian/Lembaga

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1	52	433.865.000	83.335.000	83.335.000	-

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp.83.335.000 sampai dengan triwulan III tahun 2025 tidak terdapat pagu yang dibuka blokirnya, sehingga pagu masih tetap dengan nilai Rp.433.865.000, jika pagu blokir dibuka maka pagu anggaran akan menjadi Rp.517.200.000. Pagu blokir ini berasal dari kegiatan Program Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat yang merupakan biaya perjalanan dinas.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 04	Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401113	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 23/10/2025 10:28 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **Ditjen Badan Peradilan Agama**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 401113 **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/10/25 10:30 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,740,000	1,380,000	0	1,380,000	79.31
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,740,000	1,380,000	0	1,380,000	79.31
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,740,000	1,380,000	0	1,380,000	79.31
	JUMLAH PENDAPATAN	1,740,000	1,380,000	0	1,380,000	79.31

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 401113

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 9:53 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,740,000	1,380,000	(360,000)	79.31	2,250,000	1,110,000	(1,140,000)	49.33
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,740,000	1,380,000	(360,000)	79.31	2,250,000	1,110,000	(1,140,000)	49.33
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,740,000	1,380,000	(360,000)	79.31	2,250,000	1,110,000	(1,140,000)	49.33
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	517,200,000	10,070,000	(507,130,000)	1.95	224,365,000	94,767,000	(129,598,000)	42.24
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	517,200,000	10,070,000	(507,130,000)	1.95	224,365,000	94,767,000	(129,598,000)	42.24
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 401113

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 9:53 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	517,200,000	10,070,000	(507,130,000)	1.95	224,365,000	94,767,000	(129,598,000)	42.24
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KORAS PENGGUNA ANGGARAN

WAHIDA MUSLIHAH
NIP. 197803272002122001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM

Tgl Cetak : 20/10/25 9:40 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,275,000	0	1,275,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,800,000	0	1,800,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	3,075,000	0	3,075,000	
JUMLAH ASET	3,075,000	0	3,075,000	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,800,000	0	1,800,000	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	460,000	0	460,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,275,000	0	1,275,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,535,000	0	3,535,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,535,000	0	3,535,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(460,000)	0	(460,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(460,000)	0	(460,000)	()
JUMLAH EKUITAS	(460,000)	0	(460,000)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,075,000	0	3,075,000	

Keterangan :

FINAL



Jakarta, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KASASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 9:53 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,380,000	1,110,000	270,000	24.324
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,380,000	1,110,000	270,000	24.324
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,380,000	1,110,000	270,000	24.324
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	7,730,000	14,317,000	(6,587,000)	(46.008)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	2,800,000	80,450,000	(77,650,000)	(96.52)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM

Tgl Cetak : 20/10/25 9:53 AM

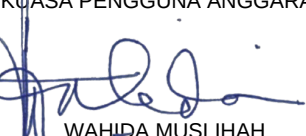
Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,530,000	94,767,000	(84,237,000)	(88.889)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,150,000)	(93,657,000)	84,507,000	(90.23)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(9,150,000)	(93,657,000)	84,507,000	(90.23)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(9,150,000)	(93,657,000)	84,507,000	(90.23)

Keterangan :
FINAL



Jakarta, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHIDA MUSLIHAH
NIP. 197803272002122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 20/10/25 6:32 AM

Tgl Cetak : 20/10/25 9:53 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,150,000)	(93,657,000)	84,507,000	(90.23)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	8,690,000	93,657,000	(84,967,000)	(90.72)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(460,000)	0	(460,000)	0
EKUITAS AKHIR	(460,000)	0	(460,000)	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TRIWULAN III TA 2025

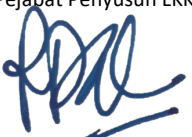
Kode dan Nama UAKPA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
 Kode dan Nama Eselon 1 : (005.04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
2	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	V	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V
	a. Pagu/DIPA		V
	b. Estimasi PNBP		V
	c. Belanja		V
	d. Pengembangan Belanja		V
	e. Pendapatan		V
	f. Pengembangan Belanja		V
	g. Kas BLU		V
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V
	i. Kas Hibah		V
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V

	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya

1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak

3	Apakah formula perhitungnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,  (Rizal Mutaqin, S.E., M.M.) NIP. 197605212005021001 Jakarta, 20 Juli 2025 Penelaah,  (Andri Mardika, S.E) NIP. 199708232020121005				